

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

1. Sejarah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Dinas adalah unsur pelaksana urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.¹³ Perikanan adalah Segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan.¹⁴ Sehingga menurut peneliti Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan.

Adapun sejarah instansi pemerintah yang menangani urusan perikanan di kabupaten Tulungagung dapat ditelusuri pada tahun 1951. Pada tahun tersebut, berdiri Jawatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di Kelurahan Tamanan Kabupaten

¹³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasal 1 Ayat 4.

¹⁴ KBBI (Diakses pada Senin, 21 Desember 2020, pukul 15.05 WIB)

Tulungagung. Jawatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 1951, Provinsi Jawa Timur diserahkan sebagian urusan perikanan darat oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 1970-an, Jabatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung menempati kantor baru di kompleks perkantoran sebelah utara Stadion Rejoagung Jl. Pahlawan, Tulungagung. Pada tahun 1983, terjadi perubahan nomenklatur Jawatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung menjadi Cabang Dinas Perikanan Daerah di Kabupaten Tulungagung. Seiring dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, pada tahun 1997, nomenklatur cabang Dinas Perikanan Daerah di Kabupaten Tulungagung berubah menjadi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tulungagung. Dinas baru ini tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi merupakan salah satu instansi dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam perkembangannya,

kebijakan pemerintah pusat melahirkan Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Tulungagung merubah nomenklatur Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tulungagung menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung dan menyediakan kantor baru di Jl. Ahmad Yani Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung kembali Pindah Kantor pada tahun 2003, menempati kantor baru di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 04, Jepun, Tulungagung. Pada tahun 2014, terbit Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengurangi sebagian kewenangan dalam urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota dan melimpahkannya ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Restrukturasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2014 dilakukan pada tahun 2016 melai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah. PP18/2016 melai penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

45/KEPMEN-KP/ 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam Kepmen KP 45/2016 ini Kabupaten Tulungagung ditetapkan memiliki intensitas dan beban kerja berkategori sedang. Sejak berdiri di tahun 1951 hingga saat ini (tahun 2017), Dinas Perikanan sudah dipimpin 9 kepala Dinas sebagai berikut:

1. Soewarto (1951-1983)
2. Ir. Achmad Slamet (1983-1987)
3. Ir. Umar Said (1987-1997)
4. Ir. Supartono (1997-2008)
5. Drs. Kabib, M.Si. (2008-2010)
6. Drs. Hendry Setyawan, M.Si. (2010-2013)
7. Ir. Sigit Widiono Purwo (2013-2014)
8. Drs. Suprpto, M.M. (2014-2016)
9. Ir. Tatang Suhartono, M.Si. (2016-sekarang)

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Visi

Visi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tulungagung sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Perikanan terpadu yang berwawasan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

b. Misi

Misi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat terdiri dari berikut:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan jasa sektor kelautan dan perikanan yang berdaya dukung pada perkembangan dunia usaha perikanan.

¹⁵ Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

- 2) Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat perikanan dan stakeholder dalam rangka pengendalian serta pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan pada lingkungan.
- 4) Meningkatkan koordinasi pelayanan tugas operasional dengan pihak terkait guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi tentang keadaan yang dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun yang akan datang yang bersifat ideal. Adapun tujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas dan jasa yang memadai bagi nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan

melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara sistematis sehingga memiliki daya saing yang cukup tinggi.

- 3) Terwujudnya kondisi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung.
- 4) Meningkatkan hubungan kerja yang koordinatif dan konsultatif dengan mitra kerja dalam rangka meningkatkan peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai fasilitator pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

d. Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang kondisi tertentu yang ingin dicapai melalui kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dicapai.

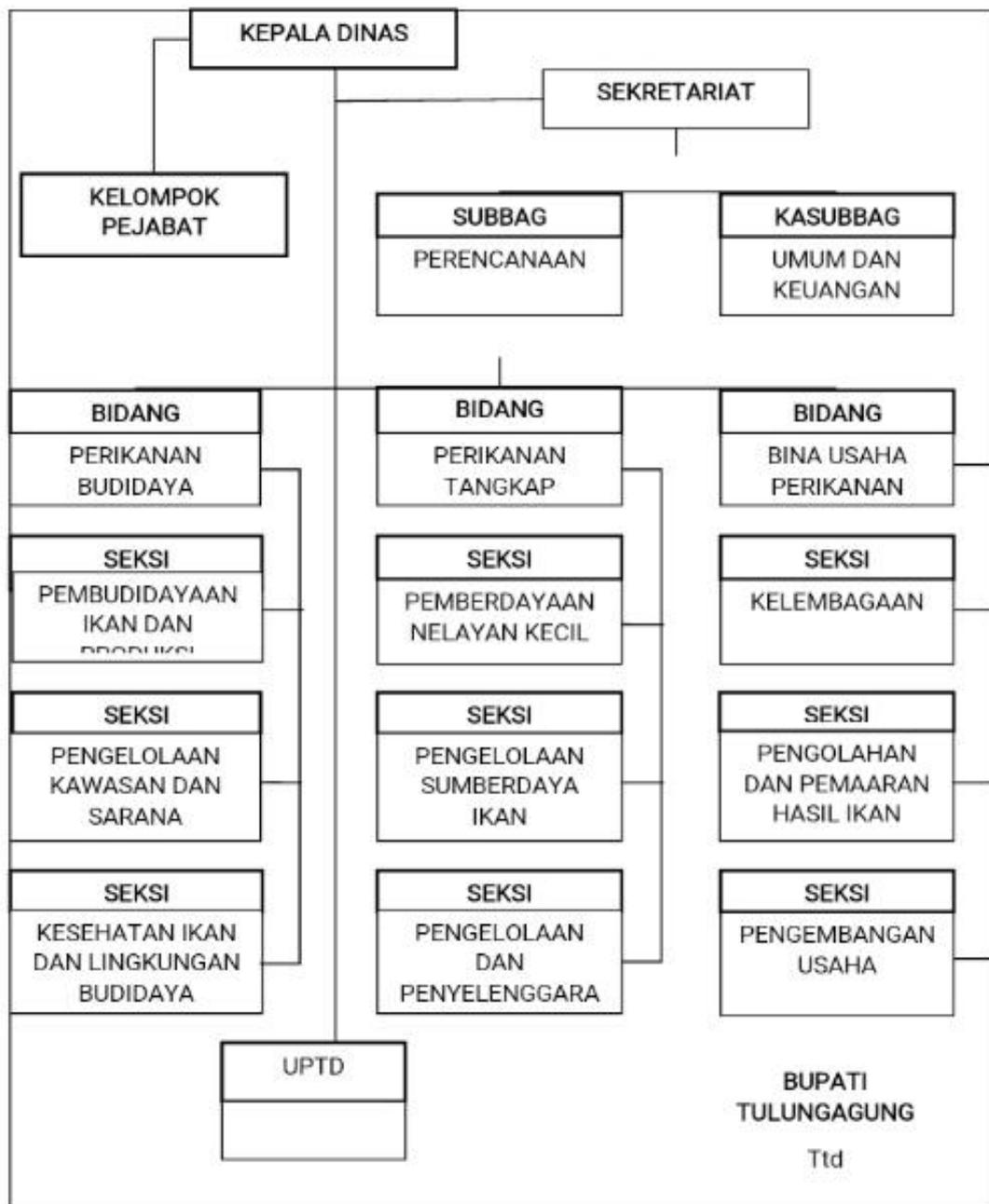
- 1) Meningkatnya fasilitas dan jasa baik dari segi sarana dan prasarana maupun pelayanan bagi seluruh pelaku usaha perikanan.
- 2) Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat perikanan.

- 3) Menurunnya tingkat kerusakan pada tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 4) Meningkatkan usaha dan kualitas sumber daya manusia kelompok sasaran program kelautan dan perikanan.

3. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

(Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung No. 58 Tahun 2016)



Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sebagai

berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
 - 1) Sub bagian perencanaan;
 - 2) Sub bagian umum dan keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 - 1) Seksi pemberdayaan ikan dan produksi
 - 2) Seksi pengelolaan kawasan dan sarana prasarana budidaya;
 - 3) Seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - 1) Seksi pemberdayaan nelayan kecil;
 - 2) Seksi pengelolaan sumberdaya ikan;
 - 3) Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
- e. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahi:
 - 1) Seksi kelembagaan;
 - 2) Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - 3) Seksi pengembangan usaha.

- f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Dinas Perikanan memiliki 4 (empat) bidang salah satunya yaitu bidang tangkap yang berfokuskan untuk nelayan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹⁶

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, merekomendasi dan mengelola data di bidang perikanan tangkap

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan sumber daya ikan pada Perairan Umum Daratan serta Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan sumberdaya ikan pada Dinas Perikanan

¹⁶ Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung Perairan Umum Daratan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

- c. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sumber daya ikan, pembinaan serta pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. Pelaksanaan rekomendasi perijinan di bidang perikanan tangkap;
- e. Pengelolaan data di bidang perikanan tangkap;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pemberdayaan nelayan kecil dalam pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- c. Merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
- d. Menyusun bahan pembinaan dalam pengembangan usaha bagi nelayan kecil;

- e. Memfasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan dan informasi kepada nelayan kecil;
- f. Memfasilitasi perijinan usaha di bidang perikanan tangkap;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi pengelolaan Sumberdaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- c. Merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
- d. Menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- e. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan konservasi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;

- f. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumberdaya ikan;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- c. Merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelelangan ikan;
- e. Melakukan pendataan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Dari penjelasan diatas bahwa Dinas Perikanan memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.

B. Hasil Laut

Hasil Laut adalah segala bentuk sumber daya laut yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berupa ikan dan lain sebagainya.¹⁷

1. Sumber Daya Ikan

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa lautan Indonesia memiliki sumberdaya ikan yang cukup kaya. Hal ini dapat dibuktikan dari luasnya lautan Indonesia dan tingginya eksploitasi ikan di Indonesia. Dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tak pelak, laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5000 kilometer, memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia

¹⁷ Sukamto, *Pengelolaan Potensi Laut...*, Hal. 38

Keberadaan laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia. Hasil laut berupa ikan menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia. Menurut UNDP, sebanyak 54 persen kebutuhan protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya. Selain itu, hasil laut Indonesia menyumbang 10 persen kebutuhan perikanan global. Laut Indonesia juga berperan penting bagi berbagai kegiatan ekonomi seperti bisnis perikanan, pelayaran, maupun pariwisata.

Setiap tahunnya Indonesia memproduksi perikanan tangkap sebesar 5 juta ton/tahun dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk total produksi perikanan setiap tahunnya mencapai 13 juta ton/tahun. Baik dari hasil penangkapan maupun budidaya. Padahal dalam perhitungan statistik Indonesia dapat memproduksi hasil perikanan mencapai 65 juta ton/tahunnya. Potensi perikanan inilah yang selayaknya terus di tingkatkan melihat besarnya potensi sumberdaya ikan yang tersedia.

Agar masyarakat pesisir kita semakin sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut. Volume dan nilai produksi untuk setiap komoditas unggulan perikanan budidaya dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan, terdiri dari: (1) Udang mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,03%; (2) Kerapu mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 9,61%; (3) Bandeng mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,45%; (4) Patin mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,73%; (5) Nila mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,03%; (6) Ikan Mas mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,44%; (7) Lele mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 26,43%; (8) Gurame mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 17,70%; dan (9) Rumput laut mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 27,72%.

2. Tumbuhan Laut

Selain kelompok hewan yang hidup di laut terdapat pula kelompok tumbuhan yang disebut tumbuhan laut yang juga banyak memiliki nilai gizi dan ekonomi. Salah satu produk produk yang sudah diketahui manfaatnya adalah makro-algae laut yang dikenal dalam dunia

perdagangan dengan sebutan rumput laut. Rumput laut atau lebih dikenal dengan sebutan seaweed merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia yaitu sekitar 8,6% dari total biota di laut. Luas wilayah yang menjadi habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau terbesar di dunia. Potensi rumput laut perlu terus digali, mengingat tingginya keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia.

Van Bosse (melalui ekspedisi Laut Siboga pada tahun 1899-1900) melaporkan bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 555 jenis dari 8.642 spesies rumput laut yang terdapat di dunia. Dengan kata lain, perairan Indonesia sebagai wilayah tropis memiliki sumberdaya plasma nutfah rumput laut sebesar 6,42% dari total biodiversitas rumput laut dunia. Rumput laut dari kelas alga merah (Rhodophyceae) menempati urutan terbanyak dari jumlah jenis yang tumbuh di perairan laut Indonesia yaitu sekitar 452 jenis, setelah itu alga hijau (Chlorophyceae) sekitar 196 jenis dan alga coklat (Phaeophyceae) sekitar 134.4. Dibalik peran ekologis dan biologisnya dalam menjaga kestabilan ekosistem laut serta sebagai tempat hidup sekaligus perlindungan bagi biota lain,

golongan makroalga ini memiliki potensi ekonomis yaitu sebagai bahan baku dalam industri dan kesehatan.

Dari hasil analisa terhadap sembilan jenis rumput laut menunjukkan bahwa kandungannya meliputi karbohidrat berkisar antara 39% sampai 51%, protein antara 17,2%-27,15%, lemak berkisar antara 0,08%-1,9%, vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan C, serta meneral kalium, phospor, natrium , ferrum, dan iodium. Masyarakat wilayah pantai terutama di negara-negara Asia Pasifik telah terbiasa menjadikan rumput laut sebagai makanan. Di Jepang, lebih dari sekitar 100 jenis rumput laut telah dimanfaatkan secara tradisional sebagai makanan.

3. Mineral dan Pertambangan

Laut tidak saja menyediakan bagi manusia sumber makanan dan obat-obatan tetapi juga menyediakan kandungan mineral dan pertambangan di dasar laut. Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yang menyebabkan timbulnya gunung berapi yang kaya dengan meneral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga, nikel. Dari 60 cekungan minyak dan gas di seluruh wilayah Indonesia, 70 % berada di laut, dan cadangan minyak bumi sebesar 9,1

mineral barrel sebagian besera berada di perairan lepas (off share).⁵ Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya potensi kelautan, khususnya minyak, gas bumi dan mineral yang berada di wilayah Indonesia.

Menurut data Kementerian (ESDM) Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa potensi energi yang dihasilkan dari arus laut di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Potensi tersebut di antaranya energi laut "Ocean Thermal Energy Conversion" (OTEC) yang merupakan terbesar di dunia.⁶ Potensi OTEC Indonesia merupakan terbesar di dunia, tersebar di 17 lokasi, dari pantai barat Sumatra, Selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, yang diprediksi memiliki sekitar 41 GW. OTEC adalah merupakan bagian dari energi baru terbarukan yang bersumber dari perbedaan temperatur air laut yang mudah ditemukan pada perairan laut tropis. Energi ini akan menghasilkan listrik dan air murni akibat penguapan air laut. Pemanfaatan OTEC akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar di bidang perikanan karena akan memberikan nutrisi pada biota laut di permukaan laut. Potensi energi panas laut di perairan Indonesia diprediksi menghasilkan daya sekitar

240.000 MW. Indonesia bagian timur memiliki nilai T (perbedaan suhu) lebih besar dari Indonesia bagian barat.

Berdasarkan riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan kandungan dasar laut Indonesia adalah memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi, yang diperkirakan dapat menghasilkan 84,48 miliar barrel minyak. Dari jumlah cekungan itu, 40 cekungan terdapat di lepas pantai dan 14 cekungan lagi ada di pesisir. Selain itu dari pengambilan sampel batuan didasar laut pada kedalaman 500-600 meter di bawah permukaan laut, di sekitar gunung api tersebut ditemukan batuan yang mengandung andesit, dan basalt. Batuan terbentuk akibat proses hidrotermal melalui proses silisifikasi dan kloritifikasi. Selain itu, teridentifikasi adanya mineral-mineral sulfida pirit, barit, dan markasit.

Kehadiran mineral logam ini merupakan indikator kemungkinan terbentuknya mineral-mineral logam lain yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas dan perak. Dugaan tersebut mengacu pada temuan sebelumnya yang dilakukan peneliti dari Australia di dasar Laut Bismarck, sebelah utara Papua Nugini. Di lokasi itu ditemukannya

endapan hidrotermal cerobong (chimney deposit) pada gunung-gunung api bawah laut, yang mengandung mineral, seperti emas, perak, tembaga, seng dan timbel.

Bagi para peneliti, dasar Laut Sulawesi dan Laut Banda merupakan lokasi yang memiliki daya tarik tinggi. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya diperkirakan adanya endapan minyak dan gas dalam jumlah potensial, diperkirakan 6,6 miliar meter kubik. Menurut dugaan Dr Yusuf Surahman, Direktur Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (TISDA) BPPT, kandungan mineral yang bernilai ekonomis akan ditemukan dalam jumlah potensial di perairan utara Sulawesi dan Maluku karena topografi dasar lautnya sama dengan di Papua Niugini yang telah diketahui kaya akan sumber mineral dasar laut. Sumber tambang dasar laut di Papua Niugini mengandung tembaga, seng, plumbum, emas, dan perak. Eksploitasinya mencapai 200 ton per hari.

Wilayah utara perairan Sulawesi, Maluku, dan Irian merupakan daerah subduksi antara dua lempeng benua Eurasia dan Pasifik. Interaksi ini menyebabkan terbentuknya gunung-gunung api. Sumber mineral dasar laut ditemukan di daerah hidrotermal atau di daerah

keluarnya cairan magma dari perut Bumi terjadi mineralisasi karena tercampur dengan air laut. Mineral itu bertumpuk-tumpuk di mulut magma menghasilkan puncak gunung yang runcing dan menjulang tinggi, pada kedalaman sekitar 2.000 hingga 4.000 meter dari permukaan laut. Puslit Geoteknologi LIPI, berhasil menemukan sumber-sumber emas di dasar laut Sangihe Talaud. Potensinya ditaksir berkisar 0,5 hingga 1 gram per ton batuan. Selain menemukan sumber logam mulia itu, juga diketahui adanya sumber mineral logam hidrotermal lainnya, yaitu perak, tembaga, seng dan timbal.

C. Pendapatan Keluarga Nelayan

1. Definisi Pendapatan Keluarga Nelayan

Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.¹⁸

Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari :

a) Usaha itu sendiri : misalnya berdagang, bertani, membuka usaha sebagai wiraswastawan.

b) Bekerja pada orang lain : misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan.

c) Hasil dari pemilihan : misalnya tanah yang disewakan dan lainlain.

pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.

¹⁸ Gilarso. T, *Pengantar Ilmu Ekonomika*, (Bandung: Ganica Excata, 2016), Hal. 9

Apabila pendapatan ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem. Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya.

Sedangkan pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan konsumsi terletak di satu tangan atau masyarakat kecil.

Berkaitan dengan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem. Dalam penelitian ini yang dimaksud pendapatan keluarga adalah

pendapatan keseluruhan yang diterima keluarga nelayan baik dari suami maupun istri nelayan.¹⁹

2. Indikator Pendapatan Keluarga Nelayan

Adapun indikator yang menjadi tolak ukur analisis pendapatan nelayan dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁰

a. Pendapatan Kepala Keluarga Sebagai Nelayan

Penghasilan kepala keluarga sebagai nelayan adalah semua hasil yang diterima oleh kepala rumah tangga dari seluruh faktor profesi sebagai nelayan berupa uang atau barang, yang berasal dari kegiatan melaut serta yang mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga nelayan.

b. Pendapatan Sampingan Keluarga

Pendapatan sebagai nelayan terkadang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga banyak dari anggota keluarga yang mencari pendapatan sampingan.

¹⁹ Muhammad Kharis, *Karakteristik Dan Peran Istri Nelayan Dalam Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kota Pekalongan*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2014), Hal. 21

²⁰ Kesri Arif, *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan Di Kenagarian Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Jurnal Buana Vol 02 No. 01*, (Padang : Universitas Negri Padang, 2018), Hal. 315

c. Jenis Penghasilan Sampingan Kepala Keluarga Nelayan

Berbagai jenis pekerjaan sampingan dilakukan oleh kepala keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berbagai jenis pekerjaan tersebut seperti, berdagang, petani, jasa, wiraswasta dan lain-lain.

d. Jumlah Penghasilan Sampingan Kepala Keluarga Nelayan

Dari pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh kepala keluarga nelayan maka kepala keluarga nelayan memiliki penghasilan sampingan.

e. Sumber - sumber Penghasilan Anggota Keluarga Nelayan

Selain kepala keluarga anggota keluarga juga ikut serta membantu dan menambah pendapatan rumah tangga keluarga nelayan. Berbagai jenis pekerjaan juga dilakukan diantaranya sebagai pedagang, petani, wiraswasta, dan lain-lain.

f. Anggota Keluarga yang Menambah Pendapatan Keluarga Nelayan

Anggota keluarga yang ikut menambah pendapatan rumah tangga keluarga nelayan seperti, anak dan istri.